



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

| | |
|-----------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2023 - 2024 |
| Masa Persidangan | : II (Dua) |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) |
| Dengan | : Forum Komunikasi Guruh Honoror (FKGH) Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Forum Guru PPG Kategori A 2023 (FGPKA). |
| Hari/Tanggal | : Rabu, 8 November 2023 |
| Pukul | : 14.00 – Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi X DPR RI |
| Pimpinan Rapat | : Dr. Abdul Fikri Faqih, MM dilanjutkan Dr. Dede Yusuf, M.E. ST. M.I.Pol./Wakil Ketua Komisi X DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X. |
| Agenda | : Penyampaian Masukan Terkait Seleksi Penerimaan PPPK Tahun 2021-2023. |
| Hadir Komisi X DPR RI | : 33 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI |
| Hadir | : 1. Eko Sunaryo, S.HI., Gr Ketua FKGH Jawa Tengah beserta jajaran pengurus. 2. Hadi Subagio, SE Ketua FKGH Jawa Timur beserta jajaran pengurus. 3. Yudi Nurman Fauzi, S.Pd Ketua Umum FKGH Jawa Barat beserta jajaran pengurus. 4. Rois Fathoni.M.M Humas I Forum Guru PPG Kategori A 2023 (FGPKA) beserta jajaran pengurus. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.10 WIB oleh Dr. Abdul Fikri Faqih, MM. dilanjutkan Dr. Dede Yusuf, M.E. ST. M.I.Pol./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari perwakilan Forum Komunikasi Guruh Honoror (FKGH) Provinsi Jawa Tengah,

Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Forum Guru PPG Kategori A 2023 (FGPKA), serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi aspirasi dan usulan dari FKGH Negeri Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan FGPKA 2023 (Bahan Paparan *terlampir*). Komisi X DPR-RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan tersebut, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kepada Kemendikbudristek RI.
2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan FKGH Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan FGPKA 2023, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
 - a. meminta FKGH Negeri Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, untuk menyampaikan data rinci mengenai guru honorer di sekolah negeri yang belum diangkat menjadi PPPK, untuk selanjutnya disampaikan ke Kemendikbudristek RI.
 - b. mendorong Kemendikburistek RI untuk melakukan ferikasi ulang terhadap penempatan guru yang lolos PPPK di sekolah negeri dan honorer yang sudah lama mengabdikan di sekolah negeri, agar keduanya tetap diberikan solusi yang tepat, sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. mendorong Kemendikbudristek RI untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif agar para guru honorer yang telah lama mengabdikan, mendapatkan hak dan status yang jelas.
 - d. meminta Kemendikbudristek RI untuk menjadikan Guru Bahasa Daerah dalam formasi tersendiri dan tidak dimasukkan ke dalam formasi Guru Seni dan Budaya.
 - e. meminta Kemendikbudristek RI untuk membuat kajian mengenai kebijakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), antara lain:
 - mempertimbangkan agar guru yang sudah memiliki Akta IV tidak perlu mengikuti program tersebut.
 - syarat calon peserta sertifikasi guru cukup dikeluarkan melalui kepala dinas, bukan melalui kepala daerah.
 - f. Komisi X DPR-RI akan mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN yang disesuaikan dengan UU No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.30 WIB.

KETUA RAPAT

TTD.

Dr. Dede Yusuf, M.E. ST. M.I.Pol.